



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PUNCAK
TIMANIUS MURIB, Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PUNCAK

ABSTRAK

Tahun 2001 Provinsi Papua mendapatkan hak khusus untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya secara mandiri yang tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal itu bertujuan untuk “meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun seraya berjalannya kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan. Terutama pada Pendidikan tingkat Dasar yang belum juga membaik. Proses Pembangunan yang sangat lambat di Provinsi Papua mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis tata kelola pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Puncak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan validitas yang digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Tata kelola pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, sistem informasi dan manajemen dan pengawasan dan evaluasi Sekolah Dasar di Kabupaten Puncak Papua belum sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Sehingga disarankan perbaikan total dari mulai perencanaan sampai evaluasi Tata Kelola Pendidikan, serta diperlukan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menunjang keberhasilan tata kelola pendidikan, diperlukan perbaikan sarana dan prasarana akses pendidikan.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Pendidikan, Sekolah Dasar*

EDUCATION GOVERNANCE ELEMENTARY SCHOOL LEVEL IN PUNCAK DISTRICT

ABSTRACT

In 2001 the Papua Province received special rights to manage and manage its household independently as stated in Law number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province. It aims to “improve the quality of life, prosperity and welfare of the people. However, while the policy is running, it has not been able to produce the quality of education as expected. Especially at the elementary level education which has not improved. The very slow development process in Papua Province reflects how low the quality of education is in the Province

The purpose of this study was to analyze the governance of primary school level education in Puncak Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive, with data collection through observation, interviews and documentation. With validity used source triangulation and method triangulation. Data analysis is done by data reduction, data display and verification.

Educational governance starting from planning, implementation, leadership, information systems and management and supervision and evaluation of elementary schools in Puncak Papua Regency is not in accordance with the Minister of National Education Regulation Number 19 of 2007 concerning Education Management Standards. So it is recommended that a total improvement from planning to evaluation of Education Governance, and the necessary capacity of Human Resources (HR) that are adequate to support the success of education governance, are needed to improve facilities and infrastructure for access to education

Keyword: *Education, Governance, School Level*